



PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JENDERAL SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
15 AGUSTUS 1974

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JENDERAL SOEHARTO

DI DEPAN SIDANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
15 AGUSTUS 1974

REPUBLIK INDONESIA



*Presiden Republik Indonesia
Jenderal Soeharto*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati;

Yang terhormat para Hadirin;

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dua hari lagi, Insya'Allah, kita akan memperingati hari ulang tahun Proklamasi yang ke - 29.

Kita bersyukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat kemerdekaan ini. Kita berterima kasih kepada semua pahlawan yang mendahului kita, yang terkenal maupun yang tidak dikenal, yang telah berjuang memberikan segala-galanya untuk kemerdekaan yang kita kenyal hari ini. Kita bertekad untuk berusaha dan bekerja agar dalam alam kemerdekaan itu kita mencapai kemajuan, merasakan kesejahteraan dan menikmati keadilan. Kita berjanji kepada generasi yang akan datang bahwa kita akan memberikan mereka hari yang lebih baik dari apa yang dapat kita rasakan sekarang.

Menjelang peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan itu kita perlu membuat renungan ulang mengenai cita-cita kita bersama; membuat renungan ulang mengenai arah dan usaha

pembangunan yang sedang kita kerjakan sekarang. Ini sangat penting, agar perjalanan kita tidak salah arah : agar kita dapat tetap meluruskan yang telah lurus dan segera melempangkan apa yang sekiranya bengkok. Ini sangat perlu. Karena dalam perjuangan membangun bangsa, kita tidak hanya diikat dan diarahkan oleh cita-cita yang tinggi dan menggairahkan, akan tetap kita juga dihadapkan pada tantangan-tantangan yang seringkali keras dan menggelisahkan. Kita berulang kali dihadapkan pada pilihan-pilihan. Acapkali pilihan itu bukan harus kita jatuhkan pada yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik; melainkan kita hanya dapat memilih yang paling kurang buruk di antara pilihan-pilihan yang lebih buruk. Itu adalah suka-duka perjuangan. Itu adalah asam garamnya pembangunan.

Yang penting adalah kita harus tahu dengan jelas dan sadar ke arah mana kita sesungguhnya bergerak : apakah gerak kita itu benar-benar makin mendekati cita-cita Kemerdekaan. Karena itu, pada hari-hari di seputar peringatan ulang tahun Kemerdekaan ini kita perlu membuat neraca nasional secara umum dan menyeluruh daripada perjalanan perjuangan dan hasil yang kita peroleh.

Membuat perhitungan neraca nasional pada tahun ini adalah tepat. Karena dalam tahun ini — tepatnya 31 Maret yang lalu — kita telah menyelesaikan REPELITA I, ialah suatu babak baru dalam perjuangan kita untuk memberi isi kepada Kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan berencana: Suatu pembangunan berencana yang kita laksanakan dengan penuh kesungguhan dan kemauan. Dengan berakhirnya REPELITA I itu, kita langsung memasuki tingkat baru pula ialah pelaksanaan REPELITA II yang merupakan kelanjutan dan peningkatan dari REPELITA I. Justru karena itu maka neraca nasional tahun ini akan berisi pula arah langkah-langkah kebijaksanaan yang telah dan harus diambil oleh Pemerintah dan oleh kita sekalian dalam menciptakan landasan dan keadaan yang dapat memperlancar pelaksanaan REPELITA II itu.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air ;

Kadang-kadang kita tertegun oleh suatu pertanyaan, mengapa kita baru melaksanakan pembangunan setelah kita hampir 25 tahun merdeka. Bukankah pada tahun-tahun sebelumnya kita juga telah pernah memiliki rencana pembangunan ?

Benar, kita pernah berusaha melaksanakan pembangunan dalam tahun-tahun pertama Kemerdekaan dahulu, yang dikenal sebagai "Rencana Kasimo". Akan tetapi perjuangan bersenjata untuk mempertahankan Kemerdekaan dan dalam kepungan musuh yang lebih kuat persenjataannya, terang tidak memungkinkan terlaksananya rencana pembangunan tadi. Kita pun pernah memiliki Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Tetapi rencana ini tidak kunjung terlaksana, karena kita tidak dengan sungguh-sungguh berusaha melaksanakan rencana pembangunan itu, melainkan selalu menyibukkan diri dengan permainan politik yang justru mendatangkan rentetan kegoncangan politik dan nafsu menjadi "mercu suar" dunia. Sedangkan penyusunan rencana itu sendiri tidak memperhitungkan kemampuan-kemampuan dan kemungkinan pelaksanaannya.

Justru karena kita telah memperoleh pelajaran dari pengalaman-pengalaman masa lampau itulah, kita sekarang harus bertekad bulat untuk melaksanakan pembangunan sebaik-baiknya dan harus berhasil. Kegagalan melaksanakan pembangunan yang sekarang ini, berarti kita dan generasi yang akan datang akan hidup main sengsara dan bahkan akan berarti kehancuran bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah, maka makin sadar dan yakinlah kita, bahwa untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan itu diperlukan dua syarat mutlak; ialah :

Pertama, adanya kemauan yang sungguh-sungguh dan tekad bulat yang tak tergoyahkan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan pembangunan itu. Segala fikiran dan usaha harus dipusatkan dan dicurahkan untuk berhasilnya pem-

bangunan itu. Seluruh bangsa ini harus mengikatkan diri secara utuh kepada pelaksanaan pembangunan itu. Karena ke-mauan dan tekad membangun itu bukan sekedar slogan politik, maka rencana pembangunan itu harus masuk akal, dan ditilik dari perhitungan ekonomi rencana pembangunan itu harus mungkin dilaksanakan dan secara sosial mendapatkan dukungan yang tidak mendua dari seluruh rakyat.

Kedua, adanya stabilitas nasional yang mantap, baik stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi. Orang tidak mungkin melaksanakan pembangunan apabila tidak dapat tenang memusatkan fikiran dan kemampuannya untuk pembangunan, karena selalu diganggu oleh keadaan yang goncang dan tidak menentu; apabila ia selalu disibuki dengan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi berbagai kericuhan dan pergolakan yang tak kunjung henti.

Dua syarat pokok itu dalam era pembangunan yang sekarang telah berhasil kita ciptakan; iklim dan suasana pembangunan yang cocok memang telah ada dan harus makin kita pupuk, agar semakin mantap dan jangan sampai mundur atau mengendor.

Kebulatan tekad, kesungguh-sungguhan dan kegairahan melaksanakan pembangunan dari seluruh rakyat tidak perlu di-sangsikan.

REPELITA I yang baru kita selesaikan telah dapat menca-pai tujuannya ialah meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak dan menciptakan landasan bagi REPELITA II yang meningkat. REPELITA II itu disusun berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh rakyat sendiri.

Pembangunan ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini tidak dapat lain karena pembangunan itu sendiri adalah usaha besar untuk merubah nasib. Bahkan suatu usaha untung-untungan tanpa perhitungan, melainkan harus merupa-kan usaha yang sadar. Sadar akan apa yang ingin dicapai da-lam jangka panjang, sadar akan apa yang dapat dicapai dalam jangka menengah, sadar akan apa yang belum mungkin ter-

capai dalam waktu dekat, sadar akan tantangan-tantangan yang dihadapi, sadar akan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan dan sadar akan beban yang harus dipikul. Dan kesadaran ini harus tumbuh dan berakar kuat secara nasional. Kesadaran yang demikian akan tumbuh, apabila setiap usaha pembangunan itu benar-benar dirasakan oleh rakyat sebagai miliknya, apabila tujuan dan arah pembangunan itu rakyat sendiri yang menetapkannya, apabila pelaksanaan pembangunan itu dirasakan oleh rakyat sebagai kepentingannya dan apabila hasil pembangunan itu pada akhirnya terasa terbagi kembali secara adil kepada rakyat.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan yang terhormat;

Stabilitas nasional sungguh merupakan syarat pokok dan mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan. Berkat terpeliharanya stabilitas nasional selama REPELITA I, maka kita berhasil menyelesaikan REPELITA I dengan hasil baik dan memungkinkan kita melanjutkannya dengan REPELITA II. Bahkan kita baru dapat mulai dengan pelaksanaan REPELITA I waktu itu setelah kita berhasil melampaui masa stabilisasi dan konsolidasi.

Itulah sebabnya, maka usaha memelihara dan memantapkan stabilitas nasional — stabilitas politik, keamanan dan ekonomi tetap merupakan program penting dari Pemerintah, seperti tercantum dalam Sapta Krida.

Setiap kebijaksanaan dan langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan REPELITA II, akan selalu diperhitungkan pula dapatnya tetap memelihara dan memantapkan stabilitas nasional. Sebaliknya Pemerintah akan mengambil tindakan yang sepadan untuk menghadapi dan menetralsisir setiap keadaan atau tindakan dari siapapun yang dapat mengganggu stabilitas nasional, yang berarti akan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan.

Karena stabilitas nasional adalah syarat mutlak bagi berhasilnya pembangunan, sedangkan tujuan dan isi pembangunan

itu sendiri adalah peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka stabilitas nasional itu haruslah stabilitas yang dinamis, stabilitas yang memberi ruang gerak bagi perubahan, perbaikan dan kemajuan; bukan stabilitas yang tertekan, mandeg dan beku.

Usaha menciptakan dan membina stabilitas nasional merupakan bagian sendiri dari usaha pembangunan bangsa. Usaha membina stabilitas politik adalah senafas dengan pelaksanaan program pembangunan di bidang politik. Stabilitas politik hanya dapat kita bina dan pelihara dengan mantap, apabila kita dapat menumbuhkan kehidupan politik dan ketatanegaraan berdasarkan dan sesuai dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pembangunan di bidang politik tidak lain adalah usaha, agar kehidupan politik dan ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu benar-benar melembaga, menjadi sistem yang mantap, mapan, tidak gampang tergoyahkan lagi.

Itulah prinsip dan tekad Orde Baru sejak kelahirannya. Justru karena kita ingin membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, justru karena kita ingin membangun kehidupan politik dan, ketatanegaraan yang sesuai dengan landasan bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, maka kita — waktu itu — memilih jalan konstitusional dalam usaha menyelesaikan situasi konflik dan dualisme dalam Pemerintahan serta untuk menegakkan lembaga Kepresidenan dan Kepemimpinan Nasional, dengan mengadakan Sidang-sidang Umum dan Sidang Istimewa MPRS dalam tahun-tahun 1966, 1967 dan 1968; tidak dengan jalan yang inkonstitusional.

Demikian pula, bangsa Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting berikutnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, seperti penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas, langsung dan rahasia, pembentukan MPR dan DPR berdasarkan hasil Pemilihan Umum, pembentukan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya — DPA - BPK - Mahkamah

Agung — sesuai dengan ketentuan konstitusi, penyelenggaraan Sidang Umum MPR, yang telah berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara; kesemuanya itu merupakan langkah-langkah dalam rangka membangun kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menegakkan kehidupan politik dan ketatanegaraan yang stabil, dinamis dan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembinaan kehidupan politik dan ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pembinaan stabilitas nasional yang mantap, erat hubungannya dengan penyelenggaraan lembaga Kepresidenan dan penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada umumnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil, Presiden dipilih oleh MPR untuk jangka waktu lima tahun. Presiden adalah Mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Di bawah MPR Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi. Dan dalam menjalankan Pemerintahan Negara itu kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan yang cocok untuk pembinaan stabilitas politik khususnya stabilitas Pemerintahan, yang sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengabaikan prinsip demokrasi. Bukankah justru Undang-Undang Dasar itu mewajibkan dilaksanakannya sendi demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia?

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai badan penjelmaan kekuasaan rakyat. Sedangkan Majelis itu dibentuk dan anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil rakyat sebagai hasil Pemilihan Umum.

Sangat terang pula bahwa Presiden tidak memegang kekuasaan mutlak. Ia sama sekali bukan "diktator". Tidak ada kekuasaan mutlak apapun yang mempunyai tempat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita yang berdasar atas, kerakyatan dan permusyawaratan ini. Juga tidak bagi Presiden yang memang diberi kekuasaan besar itu. Malahan, walaupun Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi ia diharuskan bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan di atas itu, Presiden diwajibkan tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ia harus, menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh MPR. Dalam pada itu Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa dapat dan harus mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Ini pun bukannya tanpa "sanksi". Sebab, jika Dewan Perwakilan Rakyat — yang semuanya merangkap menjadi Anggota Majelis itu — menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, maka Majelis dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya dapat meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Justru untuk menjamin stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan ini, maka tatkala kita menegakkan Orde Baru pada awal tahun '66, kita semua berbulat hati untuk melaksanakan secara murni Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Banyak jalan terbuka lebar untuk mengawasi Presiden dan seluruh tubuh Pemerintahan ini. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat ini misalnya diuji kebijaksanaan Presiden yang sangat penting dalam mengemudikan Pemerintahan dan menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara, terutama setiap kali ia mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu jelas bukan hanya angka-angka mati. Di balik angka itu terkandung kebijaksanaan yang sangat luas dari Presiden, terbentang rencana-rencana usaha bangsa kita dalam bekerja dan membangun

dirinya dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan. Kebijakan-sanaan-kebijaksanaan Presiden juga dapat diuji dari berbagai Rancangan Undang-undang yang diajukannya kepada Dewan yang terhormat ini. Tentu ada ukuran yang harus digunakan dalam melakukan penilaian dan pengawasan tadi oleh DPR. Ukuran itu adalah Undang-Undang Dasar sendiri dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR. Dalam rangkaian ini, saya dapat menilai bahwa hubungan antara Pemerintah dan DPR dalam praktek selama ini telah dapat berjalan dengan sangat lancar. Hubungan antara Pemerintah dan DPR yang kadang-kadang tampaknya tegang, akhirnya dapat diatasi dengan saling pengertian dan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kita mengharapkan agar cara kerjasama yang demikian itu dapat dipupuk terus, demi pertumbuhan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional dan demokratis yang memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Kesempatan untuk menilai hasil penyelenggaraan Kepemimpinan dan Pemerintahan Negara oleh seorang Presiden akhirnya akan ditentukan oleh Sidang MPR lima tahun berikutnya, di mana Presiden wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya seperti yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Waktu penilaian ini bahkan dapat dimulai pada waktu "kampanye" Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR dan MPR yang akan datang. Di situ calon-calon Presiden atau golongan-golongan peserta Pemilihan Umum yang mendukungnya dapat menjelaskan konsepsi-konsepsinya, yang kiranya lebih baik daripada kebijakan-sanaan dan program Presiden yang sedang menjabat dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara ataupun kebijakan-sanaan-kebijaksanaan lainnya.

Mereka yang mengemukakan konsepsi program yang dinilai lebih baik oleh rakyat, karena lebih sesuai dengan keinginannya dan lebih memperhatikan kepentingannya, tentu akan

memperoleh suara lebih banyak dalam Pemilihan Umum, yang selanjutnya akan menentukan Pemilihan Presiden yang akan datang.

Dengan jalan itu, dengan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan tumbuh stabilitas yang dinamis pada puncak-puncak Pemerintahan Negara. Karena, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 itu di satu pihak ada jaminan waktu yang cukup bagi Presiden dalam melaksanakan tugasnya; dan di lain pihak tetap tersedia sarana-sarana untuk mengawasi dan bahkan mengoreksi atau mengganti Presiden.

Cara-cara yang lain yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diterima dan tidak dapat dibiarkan, karena pasti akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat yang jelas tidak menguntungkan bagi usaha pembangunan. Lebih-lebih apabila cara-cara yang inkonstitusional itu hendak dipaksakan dengan jalan kekerasan, dengan dalih dan tujuan apapun — seperti yang ternyata dilakukan oleh dalang dan penggerak kerusuhan Peristiwa 15 Januari —, maka terhadap pelaku-pelakunya yang bertanggung jawab harus ditindak berdasarkan hukum dan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Stabilitas Pemerintahan juga terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka adalah pembantu Presiden.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri itu bekerjasama seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Justru karena merupakan pembantu-pembantu dekat Presiden dalam mengemudikan Pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, maka suasana kerjasama di antara para Menteri itu merupakan syarat yang penting.

Untuk memelihara stabilitas Pemerintahan dan lebih-lebih lagi untuk menjamin kelangsungan serta kelancaran pembangunan, maka sangatlah wajar pula apabila para Menteri itu tidak terlalu sering diganti oleh Presiden. Lebih-lebih tanpa alasan-alasan yang masuk akal. Dengan landasan pikiran yang demikian itu dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maka masalah Kabinet, masalah Menteri-menteri adalah urusan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Presiden, bukan orang lain.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang stabil dan demokratis yang sesuai dengan kebutuhan era pembangunan bukan saja diperlukan di tingkat pusat, tetapi juga sampai ke tingkat daerah.

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang tentang Pemerintahan di Daerah baru-baru ini jelas akan makin memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang demikian itu, yang sekaligus juga akan memperlancar pelaksanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Saudara Ketua yang terhormat,

Menumbuhkan kehidupan politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari hak demokrasi dan penggunaannya oleh dan di dalam masyarakat.

Sangat terang bahwa dalam alam demokrasi berdasarkan Pancasila tetap ada tempat yang terhormat bagi hak untuk menyampaikan pendapat. Juga hak berbeda pendapat dengan Pemerintah Akan tetapi bersamaan dengan itu juga harus ada tempat yang sama terhormatnya bagi tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah memelihara persatuan nasional dan menjaga keselamatan bersama, melaksanakan pembangunan untuk menikmati hari esok yang lebih bahagia dari hari sekarang, menumbuhkan kehidupan bangsa dan negara ini agar bertambah kokoh, sentausa dan dapat melindungi kita semua.

Rita cukup mempunyai wadah penyalur pendapat: kita mempunyai lembaga-lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional maupun daerah, kita dapat menggunakan kebebasan mimbar, kita memiliki pers yang kita harapkan menjadi pers yang bebas dan bertanggung jawab. Menyampaikan pendapat tidak perlu dengan cara-cara yang mengundang kekacauan dan keonaran, seperti demonstrasi. Demonstrasi bukanlah satu-satunya wajah demokrasi; lebih-lebih demonstrasi yang mendatangkan huru-hara dan bencana.

Hendaknya kita ingat baik-baik : bahwa hak demokrasi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab.

Karena itu jangan lagi ada di antara kita yang berlindung di balik demokrasi untuk menimbulkan keonaran, atau dengan dalih menegakkan kehidupan konstitusional tetapi bertujuan untuk merombak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengambil sikap atau berbuat yang demikian, akan berarti mengkhianati dan bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi itu sendiri.

Sidang Dewan yang terhormat;

Usaha lain dalam rangka menegakkan stabilitas politik dan menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis adalah langkah-langkah kita untuk meneruskan pembinaan kehidupan kepartaian, kekaryaan dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya agar ada wadah-wadah yang sehat untuk melibatkan seluruh kekuatan nasional kita dalam pembangunan bangsa di segala bidang.

Langkah-langkah ke arah ini telah kita mulai. Dan sekarang harus makin dimantapkan lagi.

Lebih dari 2 tahun yang lalu 9 partai politik telah terbagi menjadi 2 kelompok saja, masing-masing adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Organisasi-organisasi karya yang sangat banyak dahulu juga telah menjadi satu organisasi Golkar. Dengan ini maka apa

yang dikehendaki oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, ialah tiga "tanda gambar" saja dalam Pemilihan Umum yang akan datang, pasti akan terlaksana. Kecuali mungkin hambatan psikologis yang lambat laun pasti dapat diatasi, maka landasan untuk pengelompokan partai itu cukup kuat. Karena: semua partai sebagai partainya rakyat Indonesia dengan sendirinya memiliki satu ideologi nasional — ialah Pancasila semua partai mempunyai tujuan jangka panjang yang satu pula ialah terwujudnya kehidupan masyarakat seperti yang dituangkan secara khidmat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua partai jelas menggunakan cara-cara yang sama dalam memperjuangkan tujuan nasional ialah cara-cara yang demokratis dan damai. Karena itu dasar pengelompokan bukanlah ideologi golongan yang sempit, melainkan kesamaan dan titik berat perhatian dalam memperjuangkan perbaikan mutu kehidupan masyarakat kita. Ini adalah dasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Dalam jangka panjang partai harus benar-benar jadi milik nasional. Partai-partai perlu membuka pintu halamannya lebar-lebar bagi setiap warga negara Indonesia yang memang menurut ketentuan hukum berhak dan boleh masuk. Kita sungguh-sungguh memerlukan partai yang dapat menjadi wadah penyalur keinginan rakyat dan pendidikan kesadaran politik rakyat, dalam arti: kesadaran atas tanggung jawabnya terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa dalam arti yang luas.

Proses penyederhanaan kehidupan kepartaian ini harus kita percepat dan diberi dasar hukum yang lebih jelas. Untuk itu Undang-undang yang mengatur kepartaian dan kekayaan harus dapat segera kita selesaikan.

Dewasa ini sesungguhnya sedang berlangsung penataan kembali seluruh tata kehidupan politik dan sosial. Tatanan lama seperti yang tumbuh salah arah sebelum tahun '66 jelas tidak dapat menjawab kebutuhan kita untuk membangun. Rakyat terkotak-kotak dalam kesempitan ideologi dan golongan. Guru, pegawai negeri, buruh, tani dan nelayan, mahasiswa, pemuda,

pendekian, pelajar tercerai berai dalam organisasi-organisasi yang tidak lain adalah kelanjutan tangan saja dari partai politik. Akibatnya seluruh masyarakat kita terbelah dalam kepingan kelompok-kelompok kecil yang terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis. Tentu saja perhatian kepada pembangunan terdesak ke belakang dan kegiatan pembangunan terbengkalai.

Karena itu penataan kembali kehidupan politik dan sosial adalah mutlak. Mungkin usaha-usaha kita ke arah itu masih banyak hambatan-hambatannya. Tetapi kita harus terus berjalan.

Di kalangan perburuhan kita mencatat kemajuan besar dengan lahirnya Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Organisasi buruh perlu tumbuh secara wajar untuk melindungi kepentingan buruh, terutama terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang, untuk memperluas pengetahuan dan memperdalam ketrampilan buruh di lapangan pekerjaannya. Dengan begitu organisasi buruh dapat menjadi wadah bagi seluruh buruh untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan. Karena itu saya sangat menganjurkan agar dalam tiap-tiap perusahaan dapat segera dibentuk organisasi buruh.

Pembinaan organisasi buruh haruslah tetap kita lihat dalam kerangka pembangunan nasional dalam arti yang luas. Perlu segera kita fikirkan bersama hubungan antara buruh dan majikan atau perusahaan dalam alam Pancasila. Kedua-duanya harus saling menghormati, saling mengerti kedudukan dan perannya, sama-sama memahami hak-hak dan kewajibannya, dalam keseluruhan proses produksi. Dalam alam Pancasila terang tidak ada tempat bagi sikap saling berhadapan ataupun penindasan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Apabila sikap dasar ini dapat diciptakan maka dapatlah dihindarkan pemogokan oleh buruh dan penutupan perusahaan oleh majikan karena perselisihan pendapat antara keduanya.

Penataan kembali wadah-wadah dalam masyarakat lainnya pun harus kita teruskan seperti organisasi-organisasi profesi;

pemuda dan mahasiswa, tani, nelayan, pegawai, guru, wanita dan sebagainya, terlepas dan tidak terikat pada suatu partai politik ataupun golongan karya.

Dalam hubungan ini saya ingin menegaskan bahwa tidak ada niat sedikitpun dari Pemerintah untuk mengikat kebebasan golongan-golongan profesi, khususnya mahasiswa dan pemuda, calon-calon pemimpin hari esok. Ikatan demikian bukan saja tidak bijaksana akan tetapi dapat memacetkan pembangunan di hari nanti. Padahal, pembangunan memerlukan kelangsungan. Dan pembangunan yang sekarang juga untuk generasi yang akan datang.

Sekali lagi penataan kembali wadah-wadah dalam masyarakat itu sama sekali tidak berarti adanya kekangan terhadap kebebasan berserikat atau berkumpul. Langkah-langkah tadi juga tidak ada sangkut pautnya dengan kemelut yang ditinggalkan oleh "Peristiwa 15 Januari".

Yang kita lakukan adalah usaha bagaimana kita mengatur sendiri kebebasan itu agar dengan kebebasan tadi kita tetap kreatif dan menjadi bangsa yang kokoh.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Usaha memperkokoh pertumbuhan bangsa ini merupakan bagian penting dan tujuan tersendiri daripada pembangunan Indonesia. Lebih-lebih karena masyarakat kita adalah masyarakat majemuk; masyarakat yang serba ganda. Kita terdiri dari bermacam-macam suku, kita memiliki bahasa dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, kita masing-masing mempunyai adat istiadat kedaerahan yang berbeda-beda, karena kulit dan rambut kita pun tidak semuanya sama, kita menganut agama yang berlain-lainan, kita mendiami kepulauan besar kecil yang tidak terbilang jumlahnya di satu Tanah Air yang luas dan indah ini. Kita menyadari perbedaan-perbedaan itu. Akan tetapi jauh di atasnya kita lebih menyadari kebulatan tekad kita untuk bersatu padu se-

bagai Bangsa Indonesia, kita ingin hidup rukun dalam satu Negara Indonesia, kita telah mengikatkan diri dalam satu Bahasa Indonesia.

Ya, kita memang berbeda-beda tetapi kita bertekad untuk bersatu !

"Bhineka Tunggal Ika" !

Apabila kita ingin bersatu, maka persoalan pokoknya bukan menghilangkan perbedaan-perbedaan tadi. Itu adalah mustahil, karena bertentangan dengan kodrat. Biarlah perbedaan itu ada dan tetap ada. Yang kita usahakan adalah bagaimana perbedaan-perbedaan itu dapat tetap mempersatukan kita dalam persatuan yang indah, seperti indahnya kesatuan warna warni pelangi yang serasi.

Persatuan dalam keaneka ragaman bagi kita bukanlah hal yang mustahil. Kita telah ditempa oleh perjuangan dan sejarah yang panjang untuk bersatu. Lebih dalam lagi, kita sesungguhnya adalah bangsa yang senantiasa mencari keserasian dan keselarasan.

Bagaimana usaha kita memperkokoh kebhineka tunggal ikaan itulah sesungguhnya garis pembinaan dan pembangunan kehidupan, sosial politik. yang kita arah. Pembangunan kehidupan sosial politik tidak selamanya akan tampak dengan proyek-proyek lahiriah. Pembangunan sosial politik lebih menyentuh pandangan hidup, sikap mental dan dorongan-dorongan rokhani.

Dalam rangka ini sangatlah penting artinya pembinaan kehidupan agama dalam masyarakat kita yang serba ganda dan berdasarkan Pancasila itu. Semua agama yang ada di Indonesia ini, memerintahkan ummatnya agar membangun. Agama akan kehilangan sinarnya apabila masyarakatnya miskin, melarat dan lemah. Dan agama menunjukkan tujuan yang jelas dari pada pembangunan : ialah untuk kebahagiaan dan martabat manusia; bukan untuk kehancurannya. Agama memperhalus

budi pekerti manusia. Dan dengan kehalusan budi pekerti itu pembangunan akan mempunyai makna yang indah dan dalam. Tidak satu agama pun yang melarang orang bekerjasama dengan orang lain yang berlainan agama dalam bersama-sama membangun masyarakat. Karena itu tidak dapat lain, semua ummat beragama di Indonesia harus bersatu padu bahu membahu membangun masyarakat kita dalam kesatuan bangsa dan negaranya. Landasan untuk membina kehidupan bangsa dan masyarakat yang demikian itu juga telah kita miliki, ialah — sekali lagi — Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Negara kita bukanlah negara agama; bukan negara yang mendasarkan diri pada agama tertentu saja. Pasal 29 Undang-Undang Dasar kita menegaskan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Negara diwajibkan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Karenanya menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan keagamaan yang sehat di negeri Kita berbesar hati melihat hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan di bidang agama selama PELITA I yang akan ditingkatkan lagi dalam PELITA II. Masjid dan gereja baru serta tempat ibadah lainnya bermunculan di mana-mana. Setiap tahun Pemerintah mencetak ribuan kitab-kitab suci dari berbagai agama yang ada. Jumlah jemaah haji bertambah besar setiap tahunnya, sedangkan penyelenggaraan perjalanannya semakin tertib dan teratur. Ini semua menunjukkan bahwa Pemerintah sungguh-sungguh berusaha agar kehidupan beragama — semua agama yang ada — di alam Pancasila ini benar-benar dapat tumbuh dengan subur, dapat hidup berdampingan antara agama dengan rukun dan tenteram. Sebaliknya negara yang berdasarkan Pancasila ini pasti tidak membenarkan, seandainya ada salah satu agama yang berusaha untuk menguasai agama yang lain. Pemerintah pasti tidak membiarkan agama berebut umat, lebih-lebih dengan cara paksa. Sila Ketuhanan

Yang Maha Esa dari Pancasila harus dapat membimbing kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab, harus dapat memperkokoh persatuan bangsa kita, harus dapat memberi rasa kehalusan dan tanggung jawab dalam menumbuhkan demokrasi serta harus menunjukkan jalan ke arah kehidupan bersama yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Pengertian dan arah kehidupan beragama yang sehat itu masih perlu kita kembangkan dalam masyarakat kita; agar supaya sikap dan pengertian saling tenggang rasa, hormat menghormati dan saling percaya antara pemeluk-pemeluk agama yang berlain-lainan makin dapat dihayati dan benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka itu pula Pemerintah pada dasarnya menyetujui permintaan Dewan Gereja-gereja se Dunia untuk mengadakan Sidang Raya di Indonesia yang sedianya akan diadakan pada tahun 1975. Ini harus kita anggap sebagai satu kehormatan dan kepercayaan bahwa hidup rukun antara umat beragama di Indonesia benar-benar menjiwai kehidupan bangsa kita.

Namun Pemerintah juga terus berusaha agar berlangsungnya Sidang itu di Indonesia tidak akan merugikan kepentingan nasional ataupun mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kita sendiri sebagai syarat mutlak terpeliharanya stabilitas nasional demi kelancaran pembangunan. Karena itu sekiranya Sidang Raya tadi dapat mengganggu stabilitas nasional dewasa ini, maka pelaksanaannya perlu dicarikan waktu yang lebih tepat. Dalam hubungan maka keputusan Komite Dewan Gereja-gereja se Dunia baru-baru ini untuk tidak jadi menyelenggarakan sidangnya di Indonesia sangat melegakan kita semua.

Dan saya ingin mengingatkan agar kita tidak membuat salah tafsir terhadap kebijaksanaan Pemerintah itu. Saya berharap agar masyarakat selalu waspada. Jangan mudah terbius oleh berita atau cerita bohong yang diselinasikan melalui nafas ke-

agamaan. Agama memang masalah yang peka. Karena itu jangan ada di antara kita yang bermain-main api dengan agama, yang akhirnya dapat membakar tubuh kita sendiri.

Namun demikian kita tetap berbesar hati, karena jauh lebih banyak pemuka-pemuka agama dan ulama-ulama Islam, Kristen, Katolik, Hindu Bali, Budha, yang telah dapat menterjemahkan ajaran-ajaran agama itu untuk pembangunan masyarakat secara bersama-sama antara semua pemeluk agama. Dan memang dengan cara itulah seharusnya ajaran agama diterapkan dalam masyarakat kita yang ber Pancasila ini.

Dengan jalan itu perbedaan-perbedaan agama yang kita peluk tetap dapat bertemu pada tugas-tugas kemasyarakatan yang luhur dan membahagiakan kita semua; dan tidak dibesarkan perbedaannya sehingga menjadi benih-benih gangguan keamanan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, yang ternyata didalangi oleh sisa-sisa G-30-S/PKI.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Erat hubungannya dengan pembinaan stabilitas Nasional adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban sebagai syarat yang penting bagi pembangunan itu. Di samping merupakan syarat, ia juga menjadi tujuan daripada pembangunan itu sendiri, ialah agar kita semua merasakan keamanan lahir dan ketenteraman batin, bebas dari ketakutan ancaman dari luar dan bebas dari kecemasan gangguan dari dalam.

Persoalan keamanan karenanya menyangkut segi-segi yang sangat luas dan jalin menjalin. Ia tidak hanya berarti lenyapnya gangguan bersenjata yang dapat menjadi sumber rusaknya kedaulatan bangsa dan keamanan nasional, ia tidak hanya berupa kesiapan siagaan menghadapi serangan dari luar; melainkan juga usaha bagaimana agar masyarakat kita mampu menolak bahaya lain yang sama besarnya; seperti rongrongan ideologi asing terhadap Pancasila, subversi, infiltrasi, kerusakan mental, tingkah laku dan kebudayaan yang tidak sejalan

dengan Pancasila. Singkatnya, usaha-usaha untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban itu bukan hanya tergantung pada tindakan-tindakan mencegah atau tindakan kemudian dari alat-alat keamanan negara saja; akan tetapi juga sama pentingnya adalah ketahanan masyarakat sendiri sehingga mampu melindungi dirinya dari kerusakan nilai-nilai hidup yang kita anggap luhur. Ini berarti usaha-usaha untuk menanamkan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab keamanan dan ketertiban merupakan ikhtiar yang mutlak. Prasyarat utama untuk itu ialah: tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada alat keamanan dan ketertiban dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Untuk ini bukan hanya penegakan hukum saja yang diperlukan, akan tetapi lebih-lebih lagi, alat-alat keamanan dan penegak hukum itu harus benar-benar menampilkan diri sebagai pengayom dan pemberi keadilan kepada masyarakat.

Sesungguhnya manusia Indonesia senantiasa dibimbing oleh naluri ke arah yang baik, selalu mengejar nilai-nilai hidup yang kita anggap luhur. Ini jelas tercermin dalam watak keagamaan bangsa kita yang mendalam mulai dari zaman yang jauh telah silam, tercermin dalam sikap kita yang selalu ingin bergotong-royong, tercermin dalam ajaran mengenai budi pekerti yang diwariskan oleh orang-orang tua kita dan sebagainya.

Sifat-sifat dasar yang baik itulah yang harus kita pupuk terus, sehingga ia merupakan benteng yang kokoh dalam hati setiap orang dalam melawan kejahatan dan pengganggu keamanan. Naluri untuk mengejar nilai-nilai hidup yang luhur itu memang banyak mengalami cobaan sejak mulai penindasan yang kejam selama ratusan tahun dari penjajahan asing, ideologi lain yang anti Pancasila sampai dengan masuknya, akibat-akibat samping yang buruk daripada perubahan-perubahan masyarakat dalam masa pembangunan ini. Perjuangan hidup yang keras membuat sebagian orang tidak mampu bertahan, lalu mencari jalan memintas yang pendek mencari harta atau keuntungan kebendaan lain dengan mengabaikan nilai-nilai

luhur tadi, mengabaikan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Timbullah perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.

Hal-hal itu merupakan sebagian daripada sumber keresahan masyarakat yang tidak membantu kemantapan keamanan dan ketertiban. Karena itu, dalam jangka panjang, strategi pembinaan keamanan dan ketertiban bukan merupakan bagian yang terpisah, melainkan menjadi bagian yang tunggal daripada strategi pembinaan manusia Indonesia dan pembinaan bangsa Indonesia. Segi-segi ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan-pertahanan itu sendiri harus tetap merupakan satu rangkaian yang bulat dan serasi.

Tentu saja itu merupakan strategi jangka panjang yang pelaksanaannya pun akan memakan waktu.

Berbagai masalah nyata yang timbul masa kini harus segera kita selesaikan justru untuk meratakan jalan ke arah pembinaan keamanan dan ketertiban di atas landasan yang lebih kuat di masa datang.

Ancaman bahaya yang langsung dewasa ini adalah dari sisa-sisa G-30-S/PKI yang masalahnya telah kita ketahui semua. Dalam hubungan ini ingin saya menekankan lagi bahwa dalam menghadapi bahaya sisa-sisa G-30-S/PKI ini harus kita jawab dengan membuktikan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang tepat. Juga harus segera kita lenyapkan kemiskinan di tengah-tengah kita yang mereka jadikan tempat persemaian yang subur bagi propagandanya. Karena itu berhasilnya kita dalam membangun, sekaligus akan berarti menenyapkan tempat sisa-sisa akar G-30-S/PKI ini.

Kewaspadaan kita terhadap sisa-sisa G-30-S/PKI ini jangan membuat kita saling curiga. Curiga mencurigai di antara kita justru yang mereka usahakan, agar kita lemah. Terhadap yang bersalah kita memang tidak mengenal kompromi. Akan tetapi terhadap mereka yang insyaf atas kekeliruannya dan mau kembali ke jalan Pancasila, harus kita beri kesempatan untuk

turut serta dalam pembangunan. Sudah tentu dengan tindakan-tindakan pengawasan, dan pengamanan yang diperlukan, agar supaya mereka itu tidak menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Dengan kewaspadaan saya ajak masyarakat sendiri menjadi benteng yang tangguh dalam menghadapi perembesan-perembesan sisa-sisa G-30-S/PKI ini.

Di samping masalah sisa-sisa G-30-S/PKI kita masih perlu mengambil tindakan-tindakan lanjutan dalam rangka penyelesaian secara menyeluruh untuk meniadakan sumber-sumber dan akibat-akibat negatif dari "Peristiwa 15 Januari" agar peristiwa semacam itu tidak sampai terjadi lagi.

Sedangkan kegiatan-kegiatan pemberantasan kejahatan dan pengganggu keamanan lainnya seperti perampokan bersenjata yang akhir-akhir ini disinyalir meningkat, perdagangan gelap ganja dan morfin dan lain-lain terus dilakukan.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Dalam usaha kita untuk memantapkan stabilitas nasional dan pembangunan itu, maka mau atau tidak mau, kita perlu selalu memperhatikan keadaan di luar kita. Ketegangan-ketegangan di satu kawasan, krisis pangan, krisis ketenagaan, krisis moneter, jelas mempengaruhi hampir semua bangsa.. Tidak terkecuali kita.

Berlandaskan pada politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan kepada pembangunan ekonomi, kita terus mengembangkan hubungan ekonomi luar negeri dengan negara-negara sahabat serta melakukan kerjasama ekonomi dan menerima bantuan ekonomi.

Atas dasar itu pula kita berusaha mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan meningkatkan persahabatan dengan bangsa-bangsa di wilayah Asia dan Pasifik. Justru karena keterbelakangan ekonomi menjadi salah satu mata rantai terlemah daripada ketahanan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di sekitar kita, maka kemajuan ekonomi

dan kesejahteraan sosial yang akan dicapai dapat memperkuat ketahanan nasional masing-masing. Ketahanan nasional yang demikian, juga memungkinkan bangsa-bangsa itu menghindari diri dari kemungkinan menjadi ajang pertikaian kekuatan-kekuatan besar dari luar.

Dalam rangka itulah maka Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, setelah Sidang para Menteri Luar Negerinya di Jakarta baru-baru ini, menganggap sudah tiba waktunya untuk mencurahkan usaha yang, lebih banyak lagi agar kerjasama ekonomi di antara mereka memberikan hasil-hasil yang lebih nyata. Melalui Perhimpunan itu bangsa-bangsa Asia Tenggara yang menjadi anggotanya juga telah dapat mengatur hubungan bersama dengan negara-negara lain, dengan Badan-badan PBB, dengan Masyarakat Eropa dan sebagainya. Dengan "semangat Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara" perbedaan-perbedaan pendapat di antara anggota-anggotanya juga banyak yang akan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Untuk mencari jalan guna memperkuat stabilitas dan pembangunan di kawasan kita inilah, maka dalam tahun ini saya juga banyak mengadakan tukar pikiran secara pribadi dengan pemimpin-pemimpin negara-negara tetangga di sekitar kita.

Dalam pada itu memperkuat garis perdamaian dan pembangunan terus menjadi pusat perhatian politik luar negeri kita. Dalam rangka itulah kita sampai kini masih tetap ikut serta dalam ICCS di Vietnam dan mengirimkan Pasukan Garuda VI dalam tugas pengawasan gencatan senjata di Timur Tengah. Dalam menghadapi perkembangan di Timur Tengah itu, terutama untuk menentukan sikap dan kesetiakawanan negara-negara Islam, maka dalam bulan Pebruari yang lalu telah berlangsung KTT Islam ke-II di Lahore, yang menghasilkan "Deklarasi Lahore" yang terkenal itu. Dalam bulan Juni yang lalu berlangsung Pula Konperensi Islam tingkat Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur. Kendatipun kita bukan negara

Islam, namun kita selalu hadir dalam konperensi-konperensi Islam itu dan sumbangan-sumbangan pikiran kita banyak manfaatnya. Indonesia juga telah memutuskan untuk turut menjadi anggota Bank Pembangunan Islam yang dibentuk baru-baru ini. Ini adalah suatu kehormatan besar kepada bangsa Indonesia yang bagian terbesar penduduknya adalah umat Islam.

Secara umum dapat kita nilai, bahwa pelaksanaan politik luar negeri kita yang bebas aktif makin menemukan jalannya yang lurus dan makin dimengerti oleh dunia luar. Kita menyadari sepenuhnya harapan dunia agar kita memainkan peranan yang lebih besar untuk memperkuat stabilitas dan perdamaian di kawasan ini. Kita sungguh-sungguh menyadari harapan itu, karena kita memang memiliki potensi-potensi untuk melaksanakannya.

Justru karena itu, di samping agar mampu mendukung langkah-langkah kita ke luar, maka pusat perhatian tetap kita curahkan ke dalam : membereskan dan menyehatkan rumah tangga kita sendiri.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Persatuan dan kesatuan Nasional harus terus kita pelihara dan perkokoh. Usaha-usaha ini tidak akan ada henti-hentinya. Karena persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kekuatan dan modal, utama bagi bangsa untuk maju dan mencapai cita-citanya. Wilayah nasional dari Sabang sampai Merauke memang telah bulat dan utuh kembali dan diakui secara resmi oleh dunia internasional sejak berhasilnya kita menyelesaikan PEPERA pada tahun 1969. Namun kita masih harus mengusahakan agar lautan dan selat-selat yang menghubungkan rangkaian kepulauan Nusantara yang ribuan jumlahnya itu beserta dasar laut dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari keseluruhan wilayah nasional Indonesia benar-benar aman dan damai, sehingga kita mampu memanfaatkan sumber-sumber

alam milik bangsa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa semaksimal mungkin bagi kepentingan seluruh rakyat. Untuk itulah kita berusaha keras agar gagasan Wawasan Nusantara dapat diterima dan diakui oleh dunia. Dengan memakai landasan falsafat Pancasila, yang berisi nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan landasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar nasional, yang menentukan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ke dalam dan ke luar, dengan politik luar negeri yang dilandasi oleh prinsip-prinsip cinta damai, meskipun lebih cinta pada kemerdekaan, diabdikan kepada kepentingan nasional dengan tetap menghormati dan memperhatikan kepentingan negara-negara luar, serta membuka pintu lebar-lebar bagi kerjasama internasional atas dasar saling hormat-menghormati dan saling menguntungkan; saya percaya bahwa konsepsi Wawasan Nusantara itu akhirnya akan dapat diterima oleh bangsa-bangsa di dunia ini.

Dengan terus memperkuat kesatuan dan persatuan nasional dan dengan memegang teguh politik luar negeri yang bebas dan aktif kita laksanakan dan kembangkan hubungan ekonomi luar negeri kita — seperti yang telah dikatakan tadi — atas dasar saling hormat menghormati dan saling menguntungkan. Secara prinsip hubungan ekonomi yang demikian itu kita laksanakan dengan negara manapun, tanpa membedakan sistem sosial atau ideologinya; dengan negara-negara Barat maupun negara-negara sosialis. Yang pokok adalah bahwa hubungan ekonomi itu harus diabdikan pada kepentingan nasional, khususnya kepentingan pembangunan.

Dalam kerangka inilah kita sejak tahun 1967 mengadakan kerjasama ekonomi dan menerima bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman atau pun sumbangan. Sejak semula kita berpendapat dan mengambil sikap yang ketat dalam menerima bantuan luar negeri ini dengan menetapkan syarat-syarat; pertama : bantuan itu harus tanpa ikatan politik, kedua: penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan kita, dan ketiga: pembayaran kem-

bali harus sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan membebankan generasi yang akan datang.

Sesuai dengan syarat yang ketiga itu, maka kita hanya dapat menerima pinjaman dengan syarat-syarat yang lunak, ialah dengan jangka waktu pembayaran kembali minimum 25 tahun, masa tenggang 7 tahun dan bunga maksimum 3% setahun.

Bantuan pinjaman dengan syarat-syarat yang lebih keras dari itu tidak dapat kita terima karena akan membebankan dan di luar kemampuan kita untuk membayar kembali.

Dengan menetapkan syarat-syarat yang demikian itu ternyata hanya mungkin diberikan oleh negara-negara Barat yang pada tahun 1967 membentuk kelompok negara-negara dan organisasi-organisasi internasional pemberi bantuan kepada Indonesia yang terkenal dengan nama IGGI. Penjajagan yang dilakukan terhadap negara-negara Sosialis waktu itu mengenai kemungkinan memberikan bantuan dengan syarat-syarat yang lunak seperti dengan IGGI ternyata tidak dapat diterima oleh negara-negara Sosialis.

Beberapa tahun kita telah menerima bantuan pinjaman dengan syarat-syarat itu dari negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang tergabung dalam IGGI. Dan kita telah menggunakan sebaik-baiknya demi perbaikan ekonomi dan kelancaran pembangunan. Di samping itu kita juga telah makin memeras keringat dan menggali sendiri sumber-sumber kemampuan dalam negeri. Jumlah bantuan luar negeri itu memang bertambah besar dari tahun ke tahun. Akan tetapi, yang lebih penting lagi adalah, bahwa kemampuan kita untuk membiayai sendiri proyek-proyek pembangunan lebih bertambah besar. Sehingga, dalam perbandingan, bagian daripada bantuan luar negeri itu mengecil dalam keseluruhan biaya pembangunan kita.

Namun demikian, justru untuk mempercepat pembangunan, kita masih harus tetap mengerahkan segala sumber dana yang dapat kita gunakan; baik dari sumber-sumber dalam negeri sendiri maupun dari sumber-sumber luar negeri. Dalam pada

itu keadaan ekonomi kita terang bertambah baik dan jalannya pembangunan makin lancar. Neraca pembayaran kita bertambah mantap terutama karena penerimaan yang berasal dari minyak.. Dalam keadaan ekonomi yang bertambah baik itu, sekarang, kita telah mungkin untuk menerima bantuan luar negeri dengan syarat-syarat yang "kurang lunak" jika dibandingkan dengan syarat-syarat IGGI yang kita terima selama ini. Dalam rangka inilah sekarang kita sedang mengadakan penjajagan lagi kepada negara-negara Sosialis, kemungkinan dapatnya memberikan bantuan pinjaman kepada Indonesia dengan syarat-syarat yang kurang lunak, baik mengenai jangka waktu pengembalian, tenggang waktu pembayaran dan tingkat bunganya. Penjajagan ini tampaknya mendapatkan tanggapan yang cukup positif dari negara-negara Sosialis itu, sehingga diharapkan bahwa pelaksanaan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tersebut akan meningkat dalam REPELITA II ini.

Ini terang tidak berarti bahwa politik luar negeri kita berubah. Beberapa tahun dahulu, tatkala kita menerima bantuan dari negara-negara IGGI, kita tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diabdikan kepada kepentingan pembangunan nasional seperti yang digariskan oleh MPR (S).. Sekarang dan nanti pun, apabila kita mengadakan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara Sosialis, kita pun tetap berjalan lurus di atas garis politik luar negeri yang bebas aktif itu.

Segi lain lagi yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi luar negeri adalah peranan modal luar negeri. Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak, diperlukan permodalan yang besar jumlahnya. Di samping mengarahkan sepenuhnya potensi modal di dalam negeri maka dimanfaatkan pula modal dari luar negeri.

Dalam hubungan ini diusahakan adanya keseimbangan yang serasi antara peranan modal asing dan peranan modal nasional. Salah satu langkah ke arah ini adalah penyediaan bidang-

bidang tertentu khusus bagi usaha nasional. Ini berarti bahwa bidang-bidang tertentu tersebut tertutup bagi modal asing, sedang kemampuan usaha nasional untuk bergerak di bidang-bidang tersebut diusahakan agar semakin meningkat.

Demikian pula dikembangkan berbagai bentuk usaha ber sama antara usaha nasional dan usaha asing yang menjamin bahwa peranan pihak Indonesia dalam pemilikan, pimpinan dan lain-lainnya semakin lama semakin meningkat. Dalam hubungan ini yang dapat menjadi partner bagi penanaman modal asing baru adalah perusahaan-perusahaan pribumi dan perusahaan-perusahaan milik negara.

Selanjutnya perusahaan-perusahaan asing berkewajiban pula untuk secara berencana meningkatkan jumlah tenaga Indonesia di dalam usahanya. Bilamana belum cukup tersedia tenaga Indonesia di bidang-bidang tersebut maka perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan untuk mendidik tenaga-tenaga Indonesia. Pendidikan itu dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan ataupun dengan menyediakan biaya untuk pendidikan tenaga-tenaga Indonesia guna mengikuti sekolah, latihan-latihan dan sebagainya.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Marilah kita tinjau kini hasil-hasil REPELITA I serta kebijaksanaan-kebijaksanaan apa yang telah dan harus diambil oleh Pemerintah untuk memelihara stabilitas ekonomi dan sekaligus untuk mendorong kelancaran pelaksanaan REPELITA II.

Saudara Ketua yang terhormat;

Selama REPELITA 1 kita sebenarnya mencapai kemajuan-kemajuan yang sangat membesarkan hati.

Kita jelas melihat perbaikan dan peningkatan di berbagai bidang yang penting : keuangan negara, moneter, produksi, distribusi, pertanian, industri, pertambangan, prasarana dan sebagainya. Keadaan kita sekarang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelum REPELITA I; apalagi jika dibandingkan dengan keadaan sebelum masa Orde Baru.

Memang keadaan belum semuanya serba baik; belum tercapai keadilan sosial, masih sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, belum semua keluarga memiliki perumahan, belum semua orang berkesempatan memperoleh perawatan kesehatan yang murah dan mudah, belum semua anak-anak dapat menenjam pendidikan sekolah secara wajar dan lain-lain kekurangan yang masih kita rasakan.

Keadilan sosial, keadaan serba baik, pasti tidak dapat dicapai dengan satu kali membangun dalam tempo 5 tahun saja. Sedangkan baru untuk sampai pada landasan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, diperlukan 5 - 6 kali REPELITA. Tetapi bagaimanapun juga, satu hal telah pasti, bahwa keadaan kita pada umumnya lebih baik dan meningkat dibandingkan dengan 5-8 tahun yang lalu.

Apabila kita sekarang masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup, bahkan mungkin dirasakan semakin berat, ini bukanlah karena kita ini makin mundur. Justru kemajuan yang kita capai itu telah membawa serta masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan baru; yang tidak semuanya dapat dipenuhi dengan serentak dan mudah.

Banyak contoh dapat kita lihat, yang menunjukkan bahwa hasil pembangunan itu justru menimbulkan masalah-masalah baru. Ini tidak mengherankan, karena perbaikan mutu kehidupan yang ingin kita nikmati dengan melaksanakan pembangunan itu memang mengharuskan terpenuhinya berbagai kebutuhan hidup yang bertambah banyak dan meluas.

Dahulu Pak Tani tidak pernah mengeluh kalau tidak ada pupuk, karena pupuk tidak dianggap sebagai kebutuhan mutlak. Ia dapat dan biasa menanam padi tanpa pupuk, meskipun hasilnya tetap rendah. Dan waktu itu hasil beras secara nasional hanya sekitar 11 juta ton.

Sekarang Pemerintah harus berusaha keras untuk menyediakan pupuk yang cukup dan tepat pada waktunya. Karena apabila ada kelambatan sedikit saja, Pak Tani pasti mengeluh dan berusaha untuk mendapatkannya dengan jalan apa saja; kalau perlu membeli secara "gelap" dengan harga yang mahal.

Sekarang Pak Tani telah mengetahui bahwa dengan menggunakan pupuk — dan sarana produksi lainnya — ia dapat menghasilkan padi jauh lebih besar. Secara nasional produksi beras juga mengalami kenaikan, menjadi 14,7 juta ton dalam tahun 1973. Suatu kenaikan rata-rata 4,8% setahunnya selama 5 tahun terakhir ini.

Dahulu jenis barang seperti transistor masih merupakan barang yang langka, yang belum dikenal dan masih di luar jangkauan rakyat. Sekarang barang tersebut sudah menjadi kebutuhan baginya, bukan raja yang tinggal di kota-kota tetapi juga sampai di desa-desa dan di lereng-lereng gunung; dan telah banyak orang yang mampu memilikinya. Timbullah kebutuhan baru ; kebutuhan untuk memeliharanya, kebutuhan untuk menyediakan "battery" untuk tetap menghidupkan pesawatnya yang tidak selalu dapat dipenuhinya.

Sekarang, setelah kita dapat mengasembling mobil-mobil dan sepeda motor sendiri serta kemampuan masyarakat untuk memilikinya bertambah, setelah bus-bus dan mobil-mobil angkutan umum bertambah, setelah lalu-lalang truck meningkat, maka timbullah masalah kepadatan lalu lintas, terutama di kota-kota besar. Ini menimbulkan masalah baru: pelebaran jalan atau pembuatan jalan-jalan baru di kota-kota besar dan antar kota dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Kita semua merasakan betapa banyak masalah yang harus dipecahkan sebelum pelebaran jalan itu dapat dilaksanakan.

Sekarang setelah ribuan kilometer jalan dan ratusan jembatan diperbaiki dan ditingkatkan mutunya, sehingga masalah perhubungan antar kota tidak merupakan masalah lagi, timbulah soal baru ialah bagaimana dapat mengurangi sampai sekecil mungkin kecelakaan lalu-lintas yang menimbulkan korban, yang sebagian diakibatkan oleh ramainya lalu-lintas kendaraan bermotor.

Jelaslah bahwa masalah-masalah baru pasti akan tetap timbul dalam gerak maju pembangunan itu, baik masalah-masalah yang sudah dapat diperhitungkan sebelumnya maupun yang tidak terduga sebelumnya. Dan masalah-masalah tersebut

memang harus diatasi. Itulah tantangan pembangunan. Tidak ada usaha pembangunan tanpa tantangan masalah yang memerlukan pemecahan. Kita hanya dapat maju, dapat mencapai hasil apabila kita bekerja keras dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.

Yang ingin saya tekankan adalah janganlah kita mengharapkan yang bukan-bukan, seolah-olah dengan melaksanakan pembangunan ini, kita lalu dapat hidup enak — apalagi hidup seandainya—; seolah-olah hanya dengan bertopang dagu dan sekedar mengedipkan mata sudah dapat menghasilkan sesuatu.

Yang dapat diharapkan adalah bahwa dengan melaksanakan pembangunan yang berhasil, tingkat hidup kita lebih baik dan lebih bermutu dan dengan hasil-hasil itu kita dapat melanjutkan dan meningkatkan usaha pembangunan selanjutnya.

Dalam REPELITA I, dapat dikatakan kita telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan.

Sebagaimana kita ketahui, tujuan pembangunan kita, tujuan setiap REPELITA tidak lain adalah: Pertama: menaikkan taraf hidup rakyat banyak; dan Kedua : meletakkan dasar-dasar yang kuat untuk pembangunan tahap-tahap berikutnya.

Dalam REPELITA I, kedua tujuan itu jelas tercapai. Dalam lima tahun ini, setelah berakhirnya REPELITA I, taraf hidup kita jelas meningkat. Gambaran sepintas yang saya sebutkan tadi, seperti peningkatan penghasilan para petani, bertambah banyaknya macam kebutuhan masyarakat dan peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya, menandakan adanya kenaikan taraf hidup rakyat banyak, apabila dibandingkan dengan sebelum REPELITA I.

Dengan selesainya REPELITA I, kita juga dapat menciptakan dasar-dasar yang kuat untuk melanjutkannya dengan REPELITA II. REPELITA II itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif jauh lebih luas dari REPELITA I. Jumlah proyek dan besarnya pembiayaan REPELITA II jauh lebih besar dan lebih luas ruang lingkungannya. Sedangkan isi dan sifatnya makin

mendekati kepada tujuan dan aspirasi perjuangan bangsa itu sendiri; lebih memperhatikan segi-segi keadilan sosial, makin mengarah pada keseimbangan antara program-program di bidang ekonomi dan bidang non ekonomi, pembiayaannya makin ditekankan pada sumber-sumber di dalam negeri, partisipasi dan swadaya masyarakat di daerah-daerah diusahakan untuk makin diperluas, dan sebagainya.

Peningkatan dan perluasan REPELITA II itu dimungkinkan karena kemampuan kita memang meningkat sebagai basil pelaksanaan REPELITA I. Kemampuan negara meningkat dan kemampuan masyarakat juga meningkat.

Penerimaan negara yang berasal dari berbagai macam pajak dan bea cukai meningkat, sehingga memungkinkan penyediaan biaya pembangunan yang lebih besar di samping biaya untuk keperluan rutin, khususnya bagi peningkatan gaji pegawai negeri dan ABRI. Penerimaan negara itu tidak mungkin meningkat apabila tidak ada peningkatan kegiatan usaha ekonomi dan penghasilan dari masyarakat dalam REPELITA I.

Penerimaan devisa meningkat, sebagian karena volume ekspor kita meningkat: minyak, kayu, barang-barang ekspor lainnya baik yang tradisionil maupun macam-macam barang ekspor baru; sebagian karena kenaikan harga-harga barang ekspor kita di luar negeri. Dalam hubungan ini memang kita perlu tetap waspada terhadap perkembangan dalam perekonomian dunia, antara lain cepatnya kenaikan harga barang-barang impor, sedangkan sebaliknya akhir-akhir ini tampak pula gejala-gejala menurunnya harga barang-barang ekspor di luar minyak seperti kayu, karet dan lain-lain. Peningkatan ekspor berbagai macam barang itu adalah hasil usaha dan investasi kita selama REPELITA I.

Sasaran-sasaran pembangunan, ialah: pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rokhani, meskipun belum sepenuhnya dapat dicapai, tetapi yang pasti terdapat banyak kemajuan-kemajuan.

Pangan: jelas bertambah baik keadaannya dibandingkan dengan waktu sebelum REPELITA I. Usaha kita untuk menyediakan bahan pangan beras bagi setiap penduduk sebanyak 120 kg dalam setahun dapat dikatakan tercapai dalam REPELITA I. Sekarang kita tidak lagi antri beras atau gula, atau tepung terigu, atau minyak tanah, yang pada waktu sebelum REPELITA I merupakan keadaan yang sering terjadi. Juga sudah sangat jarang atau hampir tidak pernah terdengar lagi adanya daerah-daerah yang mengalami busung lapar, meskipun pada akhir tahun 1972 kita pernah mengalami keadaan pangan yang kritis, sebagai akibat musim kering yang panjang yang melanda hampir seluruh dunia.

Sandang: sekarang juga tidak merupakan masalah lagi. Dengan kenaikan produksi tekstil sebesar 100% dalam REPELITA I, yang cukup menyediakan bahan sandang rata-rata sekitar 7½ meter setiap penduduk, maka sekarang hampir tidak ada lagi tampak orang yang telanjang. Sekarang kebutuhan masyarakat bukan hanya sekedar mendapatkan bahan sandang, tetapi bahan sandang yang memenuhi selera, baik mutu dan coraknya.

Perbaikan prasarana : Keadaan prasarana dan perhubungan sekarang tidak lagi menyedihkan, rusak dan menjengkelkan seperti keadaan menjelang REPELITA I. Ratusan ribu hektar sawah telah dapat diairi makin teratur, ribuan kilometer jalan telah kita perbaiki dan ratusan kilometer jalan baru telah kita bangun, ribuan meter jembatan telah dapat dilewati dengan lebih aman, bendungan-bendungan besar dan pusat-pusat tenaga listrik telah rampung; dan angkutan di darat, laut, sungai dan udara bertambah baik. Setiap tahun makin banyak dan makin lancar barang dan orang yang dapat diangkut dari satu tempat ke tempat lain. Volume angkutan darat dan laut naik dengan rata-rata 7 — 10% setahun, sedangkan angkutan udara meningkat dengan 15%. Perbaikan prasarana dan perhubungan itu jelas telah menunjang pembangunan di berbagai sektor; yang secara keseluruhan menunjukkan laju pertum-

buhan 7% setahun. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah telah dapat dipatahkannya isolasi daerah di masa lampau, yang tidak jarang menjadi benih kegelisahan nasional, menjadi sumber ketegangan antara pusat dan daerah. Saat ini hampir dapat kita katakan bahwa seluruh penjuru Tanah Air ini sudah terjangkau oleh jaringan angkutan darat, laut dan udara serta telekomunikasi. Dengan itu — dan ini sangat penting — pembangunan prasarana dan perhubungan telah makin memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara.

Perumahan rakyat : Hasil-hasil yang dapat kita capai baru-lah hasil-hasil penelitian dan persiapan untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat yang sederhana tetapi sehat. Di samping itu juga telah berhasil ditingkatkan penyediaan air minum di berbagai kota yang sangat memerlukan. Selama REPELITA I telah diadakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan program perumahan yang lebih nyata yang akan kita mulai dalam tahun pertama REPELITA II ini. Persiapan-persiapan itu mencakup segi-segi teknis seperti penelitian bahan bangunan yang cukup kuat tetapi murah, perencanaan dan percontohan rumah murah di lapangan, penyusunan kebijaksanaan dan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk mendorong dan memperlancar usaha pembangunan perumahan rakyat.

Perluasan lapangan kerja : Dalam gerak ekonomi dan pembangunan yang meningkat dalam REPELITA I tentulah ada perluasan kesempatan kerja. Memang dalam REPELITA I itu belum dapat dipecahkan masalah kesempatan kerja keseluruhan. Namun kebijaksanaan yang diambil selalu diarahkan untuk memungkinkan perluasan lapangan kerja yang akan makin ditingkatkan dalam REPELITA II dan REPELITA-REPELITA berikutnya. Anggaran pembangunan yang tersedia dititik beratkan penggunaannya untuk pembangunan proyek-proyek yang padat karya seperti proyek-proyek prasarana dan pertanian. Dalam rangka penanaman modal asing

maupun dalam negeri prioritas diberikan pada proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak atau yang memungkinkan tumbuhnya usaha-usaha sampingan yang juga memerlukan tenaga kerja yang besar.

Kesejahteraan rokhani : Pembangunan menyangkut ikhtiar untuk memperbaiki mutu kehidupan yang memuaskan batin kita, bagaimana membuat perasaan kita tenteram dalam masyarakat kita sendiri selama kita hidup dan dalam menghadapi masa sesudahnya. Sebaliknya pembangunan pun memerlukan dorongan batiniah yang teguh, agar pembangunan itu mempunyai kekuatan gerak dari kemauan masyarakat dan arahnya tetap terpelihara. Usaha pembangunan selalu kait mengkait dengan semua segi kehidupan manusia dan betapa berhasil atau gagalnya usaha pembangunan berkisar pada manusia serta nilai-nilai luhur yang dipegangnya.

Oleh karena itu masalah kesejahteraan rokhani adalah masalah yang luas, sehingga tidak mungkin diselesaikan dalam satu kali REPELITA, dan akan tetap merupakan sasaran yang harus diraih selama kita melaksanakan pembangunan.

Dalam REPELITA I telah banyak yang kita garap dan banyak kemajuan yang telah dicapai. Kehidupan beragama tampak berkembang, sarana dan prasarana untuk melakukan ibadah, berupa mesjid, gereja, pura, kitab-kitab suci dari berbagai agama terus bertambah. Sarana pendidikan, pengembangan kebudayaan nasional, sarana kesehatan dan keluarga berencana juga telah dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan dan lain-lain kemajuan yang erat hubungannya dengan kesejahteraan rokhani.

Demikian secara singkat dan umum, Saudara Ketua, gambaran tentang hasil-hasil REPELITA I yang baru lalu. Laporan yang lengkap dan terperinci, seperti juga tahun-tahun yang lalu, saya sertakan sebagai Lampiran dari Pidato Kenegaraan ini.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Suksesnya Repelita I adalah sukses kita semua, seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Di dalam hal ini peranan dan hasil kerja daerah adalah sangat penting karena, semua proyek-proyek fisik pembangunan, baik proyek departemental/ sektoral maupun proyek-proyek daerah berada di daerah. Daerah-daerahlah yang langsung bertanggung jawab dalam mengajak dan menggerakkan rakyat untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya sesuai dengan rencana nasional dan yang hasil-hasilnya tampak serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Hasil-hasil dan kemajuan-kemajuan yang dicapai daerah-daerah tentu tidak sama; tergantung dari banyak faktor, antara lain kemampuan dan kemungkinan daerah yang bersangkutan untuk mengembangkan daerahnya, seperti sumber-sumber alamnya, sumber-sumber pembiayaannya, keadaan prasarana, jumlah penduduk dan tenaga kerjanya, dan yang tidak kalah pentingnya kepemimpinan di daerah yang bersangkutan dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Untuk memberikan dorongan yang lebih besar kepada daerah dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional serta memajukan daerahnya, Pemerintah telah menetapkan untuk memberikan tanda penghargaan kepada satu Daerah Tingkat I dan kepada satu Kabupaten/Kotamadya untuk setiap Propinsi/ Daerah Tingkat I, yang dinilai telah dapat mencapai hasil karya tertinggi dalam melaksanakan setiap REPELITA. Tanda penghargaan tersebut berupa suatu tanda dan piagam yang bernama "Parasamya Purnakarya Nugraha".

Berdasarkan penilaian secara seksama, baik yang dilakukan oleh Departemen-departemen teknis maupun oleh suatu team penilai antar Departemen, maka untuk REPELITA I ini saya telah memutuskan untuk memberikan tanda penghargaan itu kepada: Daerah Jawa Timur. Sedangkan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya di setiap Propinsi yang memperoleh tanda penghargaan adalah :

Propinsi Aceh	Kabupaten Aceh Timur
Propinsi Sumatera Utara	Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Barat	Kabupaten Tanah Datar
Propinsi Riau	Kabupaten Indragiri Hilir
Propinsi Jambi	Kotamadya Jambi
Propinsi Sumatera Selatan	Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah
Propinsi Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara
Propinsi Lampung	Kabupaten Lampung Tengah
Propinsi Jawa Barat	Kabupaten Tanggerang
Propinsi Jawa Tengah	Kabupaten Jepara
Daerah Istimewa Yogya- karta	Kabupaten Bantul
Propinsi Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek
Propinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas
Propinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara
Propinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara
Propinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Pasir
Propinsi Sulawesi Selatan	Kotamadya Ujung Pandang
Propinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton
Propinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Panggai
Propinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Gorontalo
Propinsi Bali	Kabupaten Badung
Propinsi Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur
Propinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai
Propinsi Maluku	Kabupaten Maluku Utara
Propinsi Irian Jaya	Kabupaten Jayapura.

Saya ucapkan selamat kepada Daerah-daerah yang berhasil untuk menerima anugerah yang tinggi itu. Penganugerahan ini

pasti merupakan dorongan bagi Daerah-daerah lain, yang kali ini belum berkesempatan untuk mendapat anugerah itu, untuk bekerja lebih keras mensukseskan REPELITA II.

Saudara-saudara;

Dalam memasuki pelaksanaan REPELITA II ini, mau tidak mau kita juga harus melihat keadaan sekeliling kita, keadaan ekonomi dunia. Sebab, tidak semua unsur yang membuat pembangunan itu berhasil sepenuhnya berada di tangan kita. Kita hidup dalam dunia yang semakin erat tali temali dan hubungannya, di mana banyak unsur yang saling bertautan dan mempengaruhi. Banyak perkembangan dunia yang akibat, buruknya tidak dapat kita elakkan begitu saja.

Kita juga harus terus waspada ke dalam. Gerak pembangunan yang luas mengharuskan kita mengamati lebih teliti semua segi dan segera mengambil langkah-langkah pembetulan apabila ada hal-hal yang tidak beres atau yang mengkhawatirkan, yang dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan REPELITA II.

Dalam mengambil langkah-langkah ke depan di bidang ekonomi, kita perlu juga mengingat kembali keadaan dan pengalaman masa lampau; apa yang menyebabkan kemerosotan ekonomi waktu itu dan apa yang memungkinkan kita mengatasi keadaan dan mencapai hasil dalam REPELITA I.

Pada waktu Orde Baru mulai ditegakkan maka perekonomian Indonesia sedang dilanda hyper-inflasi yang benar-benar menggoyahkan segala sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bukan saja kehidupan ekonomi menjadi lumpuh, melainkan segala kepercayaan kepada mata uang sendiri telah mencapai titik yang terendah. Kenaikan harga yang tiada terkendalikan itu telah menimbulkan suasana yang mencekam dan melemasakan, seolah-olah tiada lagi jalan ke luar untuk mengatasinya dan tiada mungkin pula dilaksanakan suatu usaha pembangunan nasional.

Namun berkat usaha yang sungguh-sungguh daripada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh rasa tanggung jawab bertolak dari sikap dasar untuk lebih mendahulukan hal-hal yang benar-benar perlu didahulukan, maka apa yang seolah-olah tidak mungkin teratasi itu akhirnya terbukti dapat dikendalikan. Laju inflasi yang sangat tinggi itu setapak demi setapak dapat dikembalikan kepada proporsi yang wajar dan proses pembangunan nasional mulai dapat dilaksanakan. Kepercayaan kepada mata uang rupiah berhasil dipulihkan kembali dan kebiasaan untuk menabung uang bagi hari depan lambat laun telah tumbuh pula.

Laju inflasi dalam tahun 1966 mencapai 650% setahun, sedang lima tahun kemudian, di dalam tahun 1971, sudah turun menjadi 2,6% setahun, dan bahkan untuk tahun anggaran 1971/72 hanyalah berjumlah 0,9% setahun. Tingkat kestabilan yang tercapai itu memberikan ketenangan bekerja bagi mereka yang berpendapatan tetap, memberikan harapan perbaikan hidup bagi mereka yang berpenghasilan rendah, dan memberikan kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha, sehingga secara keseluruhan segala itu telah mendorong proses pembangunan nasional.

Akan tetapi di dalam tahun 1972 laju inflasi meningkat menjadi 25%, dalam tahun 1973 menjadi 27%, dan di dalam tahun anggaran 1973/74 bahkan mencapai 47%. Melonjaknya laju inflasi dalam tahun 1972 terutama terjadi pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut, Hal ini berhubungan erat dengan rendahnya produksi padi dalam tahun itu sebagai akibat musim kemarau yang luar biasa, dan berkaitan pula dengan krisis pangan yang melanda seluruh dunia. Berkat kewaspadaan untuk segera mengambil langkah-langkah tindakan yang tepat, maka persediaan pangan di Tanah Air kita berhasil ditingkatkan dalam jangka waktu yang relatif pendek, meskipun dunia secara keseluruhan pada waktu itu sedang mengalami kekurangan pangan yang sangat gawat.

Dengan bertambahnya persediaan pangan dan meningkatnya produksi pangan di dalam tahun 1973 maka keadaan pangan dalam tahun tersebut menjadi lebih tenang. Akan tetapi meskipun demikian ternyata laju inflasi dalam tahun tersebut tetap tinggi dan bahkan cenderung untuk lebih meningkat. Gejala pelarian dari uang ke barang, gejala spekulasi tanah dan rumah, gejala menurunnya hasrat menabung dalam mata uang nasional, kesemuanya itu merupakan petunjuk-petunjuk keadaan yang kurang sehat, yang dapat membawa ke arah berkurangnya kepercayaan kepada mata uang sendiri, dan yang dapat merupakan ancaman bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh karena itulah maka dengan tegas diambil serangkaian tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan keadaan tersebut.

Adapun gejala inflasi tersebut untuk sebagian disebabkan karena perkembangan ekonomi dunia. Sejak beberapa waktu perekonomian dunia mengalami kegoncangan-kegoncangan sebagai akibat permasalahan moneter dunia yang sangat pelik, keadaan pangan dunia yang sangat langka, permasalahan energi khususnya minyak bumi dan berbagai persoalan lain yang secara keseluruhan mengakibatkan berkecamuknya inflasi di negara-negara industri maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Kenaikan harga barang-barang di negara-negara industri mengakibatkan kenaikan harga barang-barang impor di Indonesia. Demikian pula kenaikan harga di negara-negara industri mengakibatkan naiknya harga barang-barang ekspor Indonesia, termasuk pula barang-barang ekspor yang juga dipergunakan di dalam negeri, seperti misalnya kopra yang diperlukan untuk produksi minyak goreng.

Di samping pengaruh inflasi dari luar negeri yang menjalar ke Indonesia melalui harga barang-barang yang di impor maupun yang diekspor maka berbagai faktor di dalam negeri telah pula menjadi penyebab gejala inflasi tersebut. Salah satu fak-

tor yang terpenting adalah pertambahan jumlah uang beredar yang telah meningkat dengan pesat, terutama di dalam tahun 1973. Sumber utama peningkatan jumlah uang yang sangat cepat tersebut adalah bidang perkreditan. Sumber lain lagi adalah masuknya modal luar negeri, yang ditukarkan dengan mata uang rupiah untuk dipergunakan bagi pembelian-pembelian di dalam negeri. Faktor-faktor dalam negeri yang lain lagi adalah langkanya berbagai macam barang, adanya hambatan-hambatan dalam kelancaran distribusi, di antaranya berbagai macam pungutan-pungutan liar, dan adanya gejala bahwa berbagai perusahaan dalam perhitungan biaya dan penetapan harga pokok sudah memperhitungkan kenaikan-kenaikan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Kesemuanya ini menyebabkan laju inflasi semakin meningkat.

Adapun rangkaian langkah tindakan yang diambil untuk mengendalikan laju inflasi sekaligus bertujuan pula untuk justru mempercepat laju pembangunan. Dalam hubungan ini maka langkah yang utama adalah usaha untuk lebih meningkatkan produksi karena kenaikan produksi dan penyediaan barang-barang yang diperlukan oleh rakyat banyak akan benar-benar meringankan tekanan inflasi. Sepanjang kapasitas produksi di dalam negeri belum mencukupi maka penambahan persediaan barang-barang penting tersebut dilakukan melalui impor. Dalam hubungan ini maka di samping pengadaan stock barang-barang yang penting bagi kehidupan sehari-hari seperti beras, gula dan sebagainya, juga diselenggarakan persediaan stock yang cukup besar bagi barang-barang yang diperlukan bagi pembangunan, diantaranya semen, besi beton, pupuk, benang tenun, kertas dan sebagainya. Dengan adanya stock yang cukup besar maka perkembangan harga-harga barang-barang penting tersebut dapat dikendalikan secara efektif. Misalnya, dengan persediaan beras yang ada pada Pemerintah sebanyak lebih dari 800.000 ton dewasa ini, maka dapatlah ditiadakan setiap hasrat untuk berspekulasi di dalam bidang perdagangan beras.

Demikian pula barang-barang ekspor yang juga dipergunakan untuk produksi di dalam negeri dapat dikurangi atau dilarang sama sekali eksportnya bilamana produksi di dalam negeri memerlukannya. Misalnya: kopra telah dilarang untuk ekspor, sedang sejumlah minyak sawit diwajibkan untuk disediakan untuk keperluan produksi dalam negeri, meskipun harga di pasaran dunia dewasa ini sangat menarik.

Peningkatan produksi dan penyediaan barang-barang penting dapat langsung mempengaruhi tingkat harga sepanjang penyaluran benar-benar dapat dilaksanakan secara lancar.. Oleh karena itu maka langkah lebih lanjut adalah usaha melancarkan penyaluran barang-barang dengan jalan peningkatan investasi dalam prasarana jalan, pelabuhan, kapal, kereta api dan sebagainya, perbaikan tata kerja yang mempengaruhi arus barang, pemberantasan praktek pungutan dan pemerasan terhadap dunia usaha yang jelas menaikkan biaya penjualan, dan sebagainya.

Selanjutnya Pemerintah secara seksama mengikuti cara-cara menghitung dan menetapkan biaya pokok daripada perusahaan-perusahaan milik negara maupun perusahaan-perusahaan swasta yang besar serta mengarahkan mereka untuk kembali kepada cara perhitungan harga yang lebih wajar. Dalam rangka mengurangi beban biaya produksi maka untuk berbagai jenis bea masuk, pajak penjualan dan pajak-pajak lainnya diberikan keringanan.

Suatu bagian yang sangat penting dalam rangkaian langkah-langkah untuk mengendalikan kenaikan harga-harga adalah usaha untuk mengurangi kecepatan laju pertambahan jumlah uang yang beredar. Untuk itu suku bunga deposito berjangka serta Tabanas telah dinaikkan, dan dimulai pula jenis deposito berjangka yang Baru, yakni untuk ,satu setengah dan dua tahun. Dengan jalan demikian maka sebagian daripada uang yang berkeliaran dalam masyarakat dan dipergunakan untuk kegiatan spekulasi dapat ditarik untuk masuk dalam per-

bankan. Dalam jangka waktu 4 bulan jumlah deposito berjangka telah meningkat dengan lebih dari Rp. 40 milyar, suatu kenaikan sekitar 30%. Langkah tindakan lain lagi adalah kenaikan suku bunga pinjaman secara selektif, penyempurnaan pelaksanaan cadangan wajib bagi perbankan dan pembatasan di dalam ekspansi kredit. Segala sesuatu ini dilakukan secara selektif dan terarah sehingga justru mendorong pembangunan di bidang-bidang yang memperoleh prioritas utama. Demikian pula telah diambil langkah-langkah untuk lebih menertibkan dan mengendalikan pemasukan modal dari luar negeri yang ditukar ke dalam rupiah untuk pembiayaan dalam negeri. Dalam rangka pelaksanaan keseluruhan rangkaian Langkah tindakan ini adalah penting sekali bahwa dunia perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, benar-benar berpegang teguh kepada peraturan permainan yang digariskan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pengamatan yang seksama maka tampaklah bahwa rangkaian tindakan yang telah diambil itu kini mulai menunjukkan hasil-hasil yang memberi harapan; hasrat spekulasi tampak mulai berkurang; berbagai macam barang serta bahan baku untuk produksi yang semula ditimbun, kini mulai masuk pasaran kembali; di lain pihak hasrat menabung tampak mulai tumbuh lagi; segala sesuatu ini mengakibatkan bahwa laju kenaikan harga dalam bulan-bulan akhir ini adalah lebih rendah daripada bulan-bulan sebelumnya. Namun demikian jelas kiranya, bahwa tetap diperlukan kewaspadaan yang terus menerus agar tujuan rangkaian tindakan-tindakan tersebut benar-benar menjadi kenyataan.

Arah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dan akan diambil oleh Pemerintah adalah agar stabilitas ekonomi tetap terpelihara sedangkan pelaksanaan REPELITA II dapat tetap lancar.

Dalam pada itu, perlu pula kita catat, bahwa walaupun ada gejolak inflasi yang melanda dunia, namun kedudukan rupiah kita terhadap mata uang dollar cukup mantap. Selama tiga tahun ini kurs rupiah terhadap dolar tetap tidak berubah:

Rp. 415,— terhadap US \$ 1,—. Ini adalah kurs rill, karena kurs yang ditetapkan itu dapat dikatakan tidak berbeda dengan kurs di pasar bebas.

Dengan kemantapan nilai rupiah ini, maka oleh Dana Moneter Internasional dengan persetujuan kita, mata uang rupiah telah diputuskan untuk dimasukkan dalam "currency budget" dana lembaga keuangan dunia tersebut dan telah diputuskan pula sebagai mata uang yang "convertable".

Sungguh, rupiah telah membuka babak baru dalam sejarahnya!

Perlu saya tegaskan di sini bahwa masuknya rupiah ke dalam dana budget tadi tidak berarti kita diikat oleh lembaga internasional itu. Kita tetap memiliki kebebasan dalam melaksanakan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan pembangunan dan rakyat Indonesia sendiri, termasuk menentukan nilai rupiah.

Namun yang penting dalam hal ini adalah bagaimana menjaga kestabilan nilai mata uang kita, agar tetap dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh dunia. Karenanya adalah tidak masuk akal, adanya desas-desus yang menyatakan bahwa Pemerintah bermaksud untuk merubah kurs rupiah ataupun melakukan tindakan mengunting uang. Saya tegaskan bahwa desas-desus itu tidak benar.

Dalam pada itu di semua negara di dunia disadari bahaya kenaikan harga yang tidak terkendalikan bagi negara masing-masing maupun bagi perekonomian dunia. Karenanya mereka semua berbulat hati untuk mengendalikan kenaikan harga di negara masing-masing. Bilamana semua negara benar-benar bersungguh hati dalam usaha tersebut, maka ada kemungkinan bahwa gejala kenaikan-kenaikan harga internasional yang luar biasa itu akin agak mereda. Akan tetapi hal itu mengandung banyak sekali ke-tidak-pastian. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk benar-benar berusaha mengendalikan berbagai faktor di dalam negeri yang dapat mendorong kenaikan harga-harga.

Salah satu permasalahan dalam usaha mengurangi akibat inflasi di negara-negara lain terhadap ekonomi Indonesia adalah masalah penentuan harga bahan-bahan pokok yang untuk sebagian diproduksi di dalam negeri dan untuk sebagian lagi di impor dari luar negeri. Antara lain hal ini menyangkut harga beras dan juga gula. Dalam berbagai pasaran di luar negeri harga beras dan gula telah sangat melonjak, jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga beras dan gula di Indonesia. Dalam rangka mengendalikan harga barang-barang pokok agar supaya tetap terjangkau oleh daya beli rakyat banyak, maka beras dan gula impor tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pembelian. Hal ini berarti bahwa perbedaan antara harga impor dan harga penjualan di dalam negeri berupa beban Pemerintah yang berbentuk subsidi.

Demikian juga pupuk dewasa ini masih mutlak memerlukan pemberian subsidi dari Pemerintah, karena pupuk merupakan bahan pokok untuk peningkatan produksi pertanian, khususnya beras.

Dewasa ini kita masih harus mengimpor pupuk dalam jumlah yang besar, yang harganya terus meningkat. Kita tidak mungkin menjualnya kepada petani dengan harga impor, karena jelas di luar daya belinya. Karenanya kita harus menjualnya dengan harga di bawah harga impor; sehingga memerlukan subsidi yang tidak kecil.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya disadari bahwa sejak semula memang merupakan suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk sejauh mungkin meniadakan segala macam subsidi. Pada waktu dimulai pembaharuan kebijaksanaan ekonomi di dalam tahun 1966 maka berbagai macam subsidi telah dihapus ataupun dikurangi dengan menaikkan berbagai macam harga serta tarif angkutan. Kebijakan tersebut dilanjutkan dari tahun ke tahun dengan tiap kali mengadakan penyesuaian harga serta tarif angkutan. Demikian pula dalam rangka peningkatan produksi tekstil maka subsidi untuk kapas dan benang tenun yang di impor menjadi semakin kecil dari tahun ke tahun sehingga akhirnya dapat dihapus sama sekali.

Akan tetapi adalah suatu kebijaksanaan pokok dana Pemerintah pula untuk tidak membiarkan harga barang-barang kebutuhan pokok daripada rakyat banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasaran belaka. Lebih-lebih lagi harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut tidak akan dibiarkan terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan pasaran dunia yang dewasa ini tidak menentu. Adalah menjadi kewajiban Pemerintah untuk mengusahakan agar rakyat yang berpenghasilan rendah setidaknya-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sudah barang tentu hal tersebut perlu diusahakan agar sejauh mungkin tidak memerlukan subsidi. Bilamana subsidi tidak dapat dihindarkan maka jumlah subsidi tersebut perlu diusahakan sekecil mungkin dan lagi pula diusahakan agar bersifat sementara. Akan tetapi dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang tidak menentu dewasa ini adalah tidak bertanggung jawab untuk membiarkan ekonomi rakyat dilanda gejolak ekonomi dunia tersebut. Justru sebaliknya dalam keadaan seperti itu adalah tugas Pemerintah untuk pertama-tama melindungi ekonomi rakyat terhadap melonjaknya harga-harga bahan pokok di pasaran dunia. Langkah selanjutnya ialah mengusahakan suatu proses penyesuaian harga secara bertahap dan dengan memperhatikan jangkauan daya beli rakyat banyak. Membiarkan perkembangan harga beras dalam negeri berubah-ubah mengikuti fluktuasi harga beras di pasaran dunia yang penuh gejolak dewasa ini bukan saja akan memukul konsumen beras yang berpenghasilan rendah melainkan juga akan sangat mengganggu proses pembangunan nasional.

Selanjutnya langkah yang mutlak harus segera kita, lakukan adalah mengusahakan dapatnya barang-barang pokok tersebut diproduksi di dalam negeri sendiri secara cukup.

Karenanya intensifikasi dengan panca-usaha lengkap dan ekstensifikasi pertanian harus terus ditingkatkan secara maksimal, pembangunan pabrik-pabrik gula, pabrik-pabrik pupuk, pabrik-pabrik semen dan barang-barang pokok lainnya perlu

segera dilaksanakan, sehingga kita benar-benar dapat swasembada dan tidak perlu mengimpor lagi barang-barang tersebut.

Dengan dapat menghasilkan dan mencukupi kebutuhan sendiri akan barang-barang tersebut, bukan saja kita menjadi tidak tergantung lagi dari luar, tetapi kita juga tidak perlu lagi memberikan subsidi yang besar untuk barang-barang tersebut. Barang-barang produksi dalam negeri harganya dapat lebih murah dari pada barang-barang impor, karena biaya produksi di dalam negeri lebih rendah, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang di dalam jangkauan masyarakat tanpa memerlukan subsidi dari Pemerintah.

Saudara Ketua yang terhormat;

Dalam keadaan yang cukup memberikan harapan dan berlandaskan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pemerintah itulah kita usahakan melaksanakan REPELITA II, khususnya dalam tahun pertama ini.

REPELITA II ini merupakan langkah kita yang kedua dari beberapa langkah besar yang harus kita lakukan dalam mengusahakan tercapainya landasan masyarakat adil dan makmur.

Di dalam REPELITA II inilah akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan tugas pembangunan kita. Kita akan berusaha keras agar dalam REPELITA II ini — sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara — dapat dibangun industri-industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku seperti pabrik kertas, pengecoran aluminium, pengilangan minyak mentah, pengolahan gas alam, pemanfaatan panas bumi, pengolahan besi dan sebagainya, di samping pembangunan industri-industri bahan pokok yang telah saya sebut di muka. Di samping industri juga akan dilanjutkan pengembangan bidang pertanian. Bukan saja intensifikasi pertanian padi dan palawija yang akan ditingkatkan dalam REPELITA II ini, tetapi juga akan diperluas pada bidang-bidang perikanan, peternakan, perkebunan. Selan-

jutnya pembangunan dan perbaikan prasarana akan dilanjutkan untuk tetap dapat menunjang pembangunan di bidang industri dan pertanian serta bidang-bidang lainnya.

Dalam rangka memberikan perhatian yang lebih besar pada bidang-bidang non ekonomi maka dalam REPELITA II ini akan makin banyak dibangun gedung-gedung sekolah dan poliklinik-poliklinik, lengkap dengan peralatan dan perorangnya: guru, dokter dan perawat yang akan tersebar di seluruh pelosok Tanah Air. Dengan makin bertambahnya secara nyata sarana-sarana ini, maka bidang-bidang pendidikan dan kesehatan serta keluarga berencana akan makin terasa pula hasilnya.

Demikian pula lapangan kerja akan terbuka lebih luas, perumahan rakyat akan ditangani semakin nyata, sarana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan makin dikembangkan. Sedangkan untuk mengarahkan kepada penciptaan keadilan sosial, maka usaha-usaha akan diutamakan antara lain pada pemberian dorongan, perlindungan dan bimbingan kepada golongan ekonomi lemah, pengembangan dan memperkokoh kehidupan koperasi terutama di desa-desa, meningkatkan pembinaan hukum dan badan peradilan dan sebagainya.

Yang saya sebutkan ini hanya pokok-pokok dari sebagian usaha dan kegiatan kita dalam REPELITA II. Sedangkan program-program secara keseluruhan dan lengkap telah kita tuangkan dalam buku REPELITA II, yang telah saya keluarkan pada tanggal 11 Maret 1974 yang lalu.

Ke arah itulah kita laksanakan REPELITA II.

Berhasilnya REPELITA II tergantung sepenuhnya pada kita semua. Tergantung pada betapa gairah dan kesungguh-sungguhan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan REPELITA II. Untuk suksesnya pembangunan kita harus bekerja keras, harus hidup dengan wajar dan hemat, menghindari hidup mewah dan boros — terutama bagi mereka yang mempunyai —, meningkatkan gerakan menabung dan lain-lain sikap hidup yang memang sesuai dan dituntut oleh suasana pembangunan.

Suksesnya pembangunan sebagian juga akan ditentukan oleh sikap mental dan kegiatan aparatur negara. Saya mengharapkan agar keseluruhan aparatur negara — seluruh Pegawai Negeri dan ABRI — telah siap pula melaksanakan tugasnya masing-masing untuk berhasilnya pembangunan itu, Pegawai negeri sebagai unsur pelaksana dari aparatur negara adalah abdi negara, abdi masyarakat yang pada hakekatnya mempunyai tugas untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya minta dilayani oleh masyarakat. Pelayanan itu ditujukan agar semua kegiatan dalam masyarakat yang sedang membangun ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Samna hak dan kewajiban warga negara dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa harapan balas jasa apapun dari mereka yang dilayani. Atas pelaksanaan tugas melayani masyarakat itu ia tidak menerima imbalan jasa langsung dari masyarakat yang dilayani; kewajiban memberikan imbalan dari masyarakat yang dilayani itu apabila ada, haruslah diberikan kepada negara dalam bentuk pajak-pajak, retribusi, iuran-iuran dan sebagainya, yang merupakan penerimaan negara, yang selanjutnya sebagian akan digunakan untuk anggaran belanja rutin, termasuk gaji pegawai negeri.

Oleh karena itu, segala macam pungutan liar dan tidak sah yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur pelaksana, baik yang bertugas di bidang administrasi, keuangan negara, perizinan, keamanan dan sebagainya, dengan dalih apapun tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan.

Saya perintahkan agar setiap instansi Pemerintah membuat rencana dan mengambil tindakan yang nyata untuk menertibkan keadaan ini.

Kepada masyarakat, para pengusaha saya serukan agar membantu usaha penertiban ini.

Alasan bahwa gaji Pegawai Negeri terlalu rendah, sehingga tidak mungkin untuk membiayai hidupnya, tidak dapat diterima dan tidak dapat membenarkan si pegawai untuk bekerja

dengan malas atau korup. Menurut kenyataan, sebagian besar Pegawai Negeri tetap bekerja dengan jujur dan tekun dengan gaji yang sama dan mereka tetap hidup. Yang masih berpenghasilan rendah bukan hanya pegawai negeri, sebagian besar rakyat kita memang masih rendah pendapatannya. Justru karena itulah kita melaksanakan pembangunan. Dan kita harus bekerja keras, jujur dan tekun untuk mensukseskannya. Makin keras kita bekerja, makin besar prestasi kita, makin sukses pembangunan ini, maka makin besar penerimaan negara, sehingga makin mampu negara memberikan gaji yang lebih memadai. Seperti yang telah berulang kali dilakukan, Pemerintah telah memberikan kenaikan gaji sesuai dengan kenaikan kemampuan negara.

Mental dan cara berfikir ini sebenarnya adalah wajar, namun sering-sering sudah dilupakan atau sudah salah kaprah. Oleh karena itu harus ditertibkan kembali. Untuk ini maka di samping mental pegawai negeri harus kuat, maka unsur pengawasan juga memegang peranan yang penting.

Dalam rangka pembinaan mental pegawai dalam jangka panjang dan untuk lebih menertibkan cara-cara kerja pegawai negeri dalam rangka menegakkan kewibawaan aparatur negara secara keseluruhan, maka antara lain saya telah menetapkan peraturan untuk melarang pegawai negeri dari tingkat yang tergolong pimpinan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dagang. Saya mengharapkan agar peraturan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan pengawasan akan terus ditingkatkan. Kepada unsur-unsur pengawasan perlu diberikan tugas-tugas yang lebih jelas dan terkoordinir serta perlu disediakan sarana yang lebih memadai untuk melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan beberapa Inspektur Jenderal Pembangunan baru-baru ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh aparatur-aparatur pelaksana.

Saudara-saudara se Bangsa dan se Tanah Air;

Sidang Dewan yang terhormat;

Demikianlah laporan dan harapan saya yang ingin saya sampaikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia dalam rangka menyongsong Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke 29 ini.

Kita memang masih harus terus bekerja keras. Waktu 29 tahun adalah cukup panjang bagi kita yang hidup dalam generasi sekarang ini, untuk membuat kita, makin dewasa, sedangkan dalam rangka perjuangan bangsa untuk mencapai cita-citanya, 29 tahun adalah baru permulaan.

Tatkala kita merebut Kemerdekaan 29 tahun yang lalu, kita semua telah bergandengan tangan dan bahu membahu dengan kesediaan yang ikhlas untuk mengerahkan segala yang kita miliki, sehingga perjuangan itu berhasil.

Dan sekarang, marilah kita makin mengeratkan gandengan tangan kita dan sekali lagi mengerahkan segala kemampuan kita agar perjuangan pembangunan ini juga berhasil.

Kita telah menyelesaikan REPELITA I dengan sebaik-baiknya dan marilah kita laksanakan REPELITA II lebih baik lagi dengan keyakinan, bahwa dengan berhasilnya REPELITA II, jalan ke arah tercapainya cita-cita bangsa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, makin lapang dan lurus.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO
JENDERAL TNI

